



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, disamping mengoptimalkan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, September 2022

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



M. KHAFDAFI, SE, M.IP
Penata Tk. I / (III.d)

NIP. 19771118 200901 1 005

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP3AP2KB	22
3.1 Tujuan dan Sasaran	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	24
4.1 Matrik Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022	24
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan	36
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memuat ; program, kegiatan, dan subkegiatan ; lokasi kegiatan; indikator kinerja; kelompok sasaran; pagu indikatif dan prakiraan maju.

Kedudukan Renja OPD adalah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada OPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Meranti dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

Renja OPD diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. dan merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Meranti, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5); dan
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di masing-masing Dinas dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah. Renja ini akan menjadi program, kegiatan, SubKegiatan strategis yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD Provinsi maupun APBN.

Berkenaan dengan hal diatas, maka Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun dan dijadikan acuan dalam merumuskan standar pengukuran kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Meranti yang selanjutnya dijadikan landasan dalam Penyusunan APBD-P.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Renja (RENJA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021

Bab Ini berisikan tentang :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Bab ini berisi tentang :

- 4.1. Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pagu Indikatif
- 4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

Secara Rinci realisasi program / kegiatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target, faktor-faktor penyebab terpenuhi / tidak terpenuhi target kinerja program / kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian, kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor –faktor penyebab, terlampir dalam **tabel 1.1**

Tabel 1.1
Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	
0.0.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Peralatan Pendukung Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	3.205	0 %	1.287	100 %	3.205	0	325	0	230	0	343	0	172	0 %	1.071	0 %	2.357	0,00 %	73,56 %	
0.0.01.01.58.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 Orang	1.550	25 Orang	379	25 Orang	1.000	3	89	3	89	10	91	0	45	16 Orang	315	41 Orang	693	164,00 %	44,73 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0.0.01.01.87.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah tenaga Pelayanan Perkantoran	19 Orang	847	35 Orang	528	35 Orang	595	3	144	4	142	4	86	3	83	14 Orang	454	49 Orang	982	257,89 %	115,94 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0.0.01.01.88.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah barang dan jasa Perkantoran	19 Unit	807	19 Unit	380	19 Unit	449	0	92	0	0	0	166	0	44	0 Unit	301	19 Unit	682	0,00 %	84,41 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
0.0.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana Prasarana Aparatur	60 %	706	0 %	58	60 %	706	0	9	0	11	0	9	0	13	0 %	42	0 %	100	0,00 %	14,12 %	
0.0.01.02.276.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran	10 Unit	353	0 Unit	0	29 Unit	111	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Verifikasi Data Terpadu (Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab)		jumlah
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
0.0.01.02.277.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara	19 Unit	353	17 Unit	58	18 Unit	190	2	9	5	11	6	9	3	13	16 Unit	42	33 Unit	100	173.68 %	28.24 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
0.0.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kompetensi ASN	100 %	165	0 %	0	100 %	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0.00 %	0.00 %			
0.0.01.05.146.	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	165	0 Orang	0	7 Orang	45	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
0.0.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun	100 %	105	0 %	9	100 %	105	0	2	0	13	0	0	0	0	0 %	15	0 %	24	0.00 %	23.14 %			
0.0.01.06.06.	Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Laporan Sakip OPD	15 Dokumen	75	4 Dokumen	9	15 Dokumen	50	2	2	9	13	0	0	0	0	11 Dokumen	15	15 Dokumen	24	100.00 %	32.40 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
0.0.01.06.13.	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Jumlah Dokumen SPIP OPD	25 Dokumen	30	0 Dokumen	0	25 Dokumen	25	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin dan KAT yang diberdayakan	90 %	3.823	0 %	123	90 %	2.811	0	1	0	0	0	0	0	0	0 %	1	0 %	124	0.00 %	3.24 %			
1.01.06.15.06.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman bagi Kelompok Keluarga Fakir Miskin (FM)	Jumlah sarana prasarana masyarakat miskin yang direhab	90 Ruangan	900	0 Ruangan	0	37 Ruangan	3.540	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Ruangan	0	0 Ruangan	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		1.01.06.16 Kinerja Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Program Pelanggaran dan Urusan Sosial		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)									
1.01.06.15.12.	Pemberdayaan KAT Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah komunitas adat terpencil (KK) yang diberdayakan	200 Orang	150	0 Orang	0	150 Orang	811	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.15.13.	Rakor dan Sosialisasi Pendistribusian bantuan pangan non tunai (BPNT) / Bantuan Sosial Program sembako bagi keluarga penerima manfaat (KPM)	Jumlah Peserta	250 Orang	200	0 Orang	0	100 Orang	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.15.22.	Pembangunan balai Adat bagi Komunitas Adat Terpencil	Jumlah balai adat yang dibangun	1 Unit	462	0 Unit	0	2 Unit	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.15.24.	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Usaha Kelompok bagi Keluarga Miskin	Jumlah penanganan PMKS	1 Kelompok	39	0 Kelompok	0	41 Kelompok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.15.26.	Pelatihan Petugas Pendataan Validasi Data Kemiskinan Kabupaten kepulauan Meranti	Jumlah peserta Pelatihan	100 Orang	172	0 Orang	0	100 Orang	89	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.15.27.	Pendataan dan Inventarisir Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Peserta Pendataan dan Inventarisir Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	112 Orang	750	0 Orang	0	112 Orang	234	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.15.28.	Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Peserta Petugas Pendampingan SLRT	109 Orang	650	0 Orang	0	109 Orang	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	1.01.06.21 Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Pencapaian Kinerja s/d tahun 2021 (%)	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Serikat Unipaten Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Pelanggaran		
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)						K	Rp (Juta)
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)						K	Rp
1.01.06.16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima layanan rehabilitasi	8 Orang	192	31 Orang	67	48 Orang	125	8	16	0	0	6	7	0	0	14 Orang	23	45 Orang	90	562.50 %	46.85 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.16.17.	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Jumlah ktk yang menerima pelayanan	30 Orang	50	0 Orang	0	10 Orang	140	4	9	0	0	0	0	0	0	4 Orang	9	4 Orang	9	13.33 %	18.14 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.16.20.	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	Jumlah anak bermasalah yang diberikan layanan	80 Orang	485	35 Orang	27	20 Orang	74	0	15	0	12	0	20	0	0	0 Orang	47	35 Orang	75	0.00 %	15.41 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah penyandang penyakit sosial yang menerima layanan rehabilitasi	25 Orang	360	0 Orang	0	25 Orang	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %			
1.01.06.20.04.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial	jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima layanan rehabilitasi	25 Orang	360	0 Orang	0	25 Orang	144	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	75 %	2.145	0 %	102	75 %	2.423	0	13	0	2	0	1.233	0	366	0 %	1.614	0 %	1.716	0.00 %	80.02 %			
1.01.06.21.06.	Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Anggota Lembaga yang dibina	20 Orang	100	0 Orang	0	20 Orang	120	11	3	0	0	6	4	0	0	17 Orang	7	17 Orang	7	85.00 %	6.84 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.01.06.21.08.	Pembinaan Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina (Orang)	40 Orang	250	0 Orang	0	40 Orang	41	0	0	0	0	0	0	0	2	0 Orang	2	0 Orang	2	0.00 %	0.92 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Pencapaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Penanggung Jawab	jumlah
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp		
1.01.06.21.17.	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang aktif	35 Orang	495	34 Orang	102	9 Orang	143	0	0	4	2	0	0	0	0	4 Orang	2	38 Orang	105	0.00 %	21.16 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.01.06.22.	Program Rehabilitasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	210	0 %	6	90 %	210	0	25	0	0	0	31	0	9	0 %	66	0 %	72	0.00 %	34.19 %		
1.01.06.22.01.	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan	30 Kelompok	210	8 Kelompok	6	30 Kelompok	154	8	25	0	0	9	31	6	9	23 Kelompok	66	31 Kelompok	72	103.33 %	34.19 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.01.06.23.	Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan	40 %	1.664	0 %	427	40 %	1.664	0	15	0	47	0	108	0	0	0 %	170	0 %	597	0.00 %	35.85 %		
1.01.06.23.01.	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Fasilitasi PKH	98 Orang	1.565	89 Orang	427	98 Orang	536	4	15	12	47	24	108	0	0	40 Orang	170	129 Orang	597	131.63 %	38.12 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.01.06.23.05.	Pengelolaan Data Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)	Jumlah data kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan	45000 Orang	99	0 Orang	0	45.000 Orang	99	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kelembagaan dan anak yang aktif	50 %	1.288	0 %	136	50 %	1.305	0	47	0	0	0	106	0	132	0 %	284	0 %	420	0.00 %	32.62 %		
1.02.02.16.05.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	jumlah lembaga PUG	9 OPD	370	0 OPD	0	9 OPD	500	0	0	0	0	0	0	9	132	9 OPD	132	9 OPD	132	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Penguatan Kelembagaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	jumlah
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp		
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)								
1.02.02.16.13.	Pengembangan kapasitas SDM Konvensi Hak Anak (KHA)	jumlah kapasitas SDM yang terlatih	50 Orang	350	0 Orang	0	50 Orang	273	0	0	0	0	0	69	0	0	0	69	0	69	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.16.16.	Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	jumlah profil gender	1 Dokumen	20	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0	0	0	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.16.23.	Pelaksanaan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap tindak Kekerasan	jumlah sdm yang kompeten	40 Orang	248	40 Orang	106	40 Orang	185	17	47	0	0	0	0	-	-	17 Orang	47	57 Orang	152	142.50 %	61.59 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	persentase perlindungan perempuan dan anak	60 Kasus	92	0 Kasus	0	60 Kasus	84	0	0	0	0	0	0	53	0 Kasus	53	0 Kasus	53	0.00 %	0.00 %			
1.02.02.17.10.	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan Kekerasan	jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang Ditangani	60 Kasus	92	0 Kasus	0	60 Kasus	55	0	0	0	0	0	44	53	44 Kasus	53	44 Kasus	53	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.02.02.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase kelembagaan perempuan dan anak yang aktif	90 %	781	0 %	56	90 %	781	0	4	0	23	0	230	0	0	0 %	256	0 %	313	0.00 %	40.01 %		
1.02.02.18.01.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Wanita yang dibina	2 Kelompok	250	2 Kelompok	39	2 Kelompok	742	1	4	0	23	1	34	0	0	2 Kelompok	60	4 Kelompok	99	200.00 %	39.47 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.02.02.18.04.	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah perempuan yang diberikan bimbingan manajemen usaha	25 Kelompok	381	34 Kelompok	17	25 Kelompok	112	0	0	0	0	24	96	0	0	24 Kelompok	96	58 Kelompok	114	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		1.02.08.17 Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Penyediaan Dana		Pelayanan Masyarakat Melalui Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Jumlah KB
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.08.15.	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB Aktif	95 %	948	0 %	184	95 %	915	0	138	0	209	0	273	0	573	0 %	1.194	0	1.378	0,00 %	145,35 %							
1.02.08.15.07.	Pembinaan Kader Tribina di 9 Kecamatan	Jumlah Kader BKB,BKR,BKL	60 Orang	150	0 Orang	0	60 Orang	106	0	51	0	6	0	35	0	33	0 Orang	125	0 Orang	125	0,00 %	83,38 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.02.08.15.08.	Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kab. Kep. Meranti	Jumlah PLKB	9 Orang	242	8 Orang	184	9 Orang	204	4	83	8	83	0	51	0	222	12 Orang	438	20 Orang	622	222,22 %	257,05 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.02.08.15.09.	Advokasi dan Fasilitasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di advokasi	50 Orang	192	0 Orang	0	50 Orang	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.02.08.15.23.	Penggarapan KB di Wilayah Sasaran Khusus dan GALCITAS	jumlah AKseptor KB	400 Unit	171	0 Unit	0	400 Unit	122	0	4	0	0	0	66	0	76	0 Unit	146	0 Unit	146	0,00 %	85,19 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.02.08.15.24.	Sosialisasi dan Fasilitasi Operasi Media bagi Calon Peserta KB MOW/MOP	jumlah AKseptor KB	120 Unit	193	0 Unit	0	120 Unit	75	0	0	0	121	0	121	0	242	0 Unit	485	0 Unit	485	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.02.08.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pik-r Aktif	100 %	416	0 %	41	100 %	416	0	0	0	0	0	0	0	432	0 %	432	0	473	0,00 %	0,00 %							
1.02.08.16.04.	Pelatihan PIK-R/M Jalur Sekolah/Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan PIK-R/M	60 Orang	416	25 Orang	41	60 Orang	124	0	0	0	0	0	0	0	432	0 Orang	432	25 Orang	473	0,00 %	0,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.02.08.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Akseptor KB Baru Aktif	95 %	379	0 %	17	95 %	379	0	40	0	41	0	0	0	47	0 %	128	0	145	0,00 %	38,23 %							

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		1.02.08.25 Kinerja Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Tingkat Sosialisasi dan Pembentukan Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Jumlah
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp			
1.02.08.17.09.	Program Pelayanan KB melalui TNI KB KES	jumlah AKseptor KB	95 Unit	201	0 Unit	0	200 Unit	0	0	0	0	-	-	-	-	0 Unit	0	0 Unit	0	0.00 %	0.00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.02.08.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase masyarakat peserta KB/KR mandiri binaan yang aktif	80 %	417	0 %	0	80 %	417	0	65	0	0	0	64	0	154	0 %	284	0 %	284	0.00 %	68.03 %					
1.02.08.18.02.	Pembinaan Kelompok UPPKS (Asosiasi Kelompok UPPKS) se-kabupaten	jumlah Kelompok yang dibina	25 Kelompok	216	0 Kelompok	0	25 Kelompok	76	1	65	0	0	0	64	0	154	1 Kelompok	284	1 Kelompok	284	4.00 %	131.34 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.02.08.18.04.	Pelatihan Pengelolaan Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS	45 Orang	201	0 Orang	0	45 Orang	89	0	0	0	0	0	-	-	0 Orang	0	0 Orang	0	0.00 %	0.00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.02.08.24.	Program pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PADU	Jumlah Kelompok BKB Holistik yang terbentuk	9 Kelompok	233	0 Kelompok	0	9 Kelompok	223	0	54	0	0	0	39	0	126	0 Kelompok	219	0 Kelompok	219	0.00 %	93.99 %					
1.02.08.24.02.	Fasilitasi Pembentukan BKB Holistik Integratif (BKB-Posyandu-Padu)	Jumlah Kelompok	9 Kelompok	233	0 Kelompok	0	9 Kelompok	129	0	54	0	0	0	39	0	126	0 Kelompok	219	0 Kelompok	219	0.00 %	93.99 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.02.08.25.	Program pengendalian penduduk	jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun dan diinformasikan	1 Dokumen	292	0 Dokumen	0	1 Dokumen	265	0	0	0	0	0	0	0	518	0 Dokumen	518	0 Dokumen	518	0.00 %	0.00 %					
1.02.08.25.01.	Pelaksanaan Advokasi Bidang Pengendalian Penduduk	Parameter Kedudukan dalam waktu 5 tahun	1 Tahun	55	0 Tahun	0	1 Tahun	0	0	0	-	-	-	-	-	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0.00 %	0.00 %			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	I		II		III		IV		K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	
									K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)							
1.02.08.25.03.	Pelaksanaan Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB berbasis Kearifan budaya lokal	Jumlah sekolah yang Dibina	20 Orang	39	0 Orang	0	20 Orang	31	0	0	0	0	0	0	0	25	0 Orang	25	0 Orang	25	0.00 %	0.00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rata-rata capaian kinerja (%)									4.80 %	-	6.00 %	-	10.40 %	-	11.83 %	-	14.75 %	-					
Predikat kinerja									Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-	Sangat Rendah	-					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			:	-																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja			:	-																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:	-																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya			:	-																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti, merupakan pelayanan di bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah Kabupaten yang terdiri atas :

- a. Pemberdayaan Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Penanganan Bencana
- e. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan
- f. Perlindungan Perempuan
- g. Pemenuhan Hak Anak
- h. Perlindungan Khusus Anak
- i. Pengendalian Penduduk
- j. Pembinaan Keluarga Berencana
- k. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pemberdayaan Sosial meliputi :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) ;
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota.

2. Rehabilitasi Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

3. Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

- a. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatannya.

4. Penanganan Bencana meliputi:

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota.

- 5. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Meliputi:**
 - a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota;
 - c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan kabupaten/Kota.
- 6. Perlindungan Perempuan meliputi :**
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/Kota.
- 7. Pemenuhan hak Anak meliputi :**
 - a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota.
- 8. Perlindungan Khusus Anak meliputi :**
 - a. Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota;
 - b. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota.
- 9. Pengendalian Penduduk meliputi :**
 - a. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 10. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) meliputi :**
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

11. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Meranti sejak Tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan pertumbuhannya. fakta sosial ini menjadi sangat berkembang, dan menjadi ironis ditengah keinginan masyarakat dan zaman menuntut adanya perbaikan kesejahteraan bagi dirinya dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang baik, pemahaman teknologi yang makin maju, dan penguatan ekonomi produksi keluarga yang kokoh.

Indikator-indikator kemajuan suatu masyarakat adalah mulai mengurangnya fakta sosial diatas dalam hal ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai jawaban keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun kemajuan-kemajuan tersebut antara lain adalah keterjangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Meranti telah meningkat cukup signifikan dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, (yakni berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Meranti) dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan terhadap PMKS yang masih sangat terbatas,
- b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,
- c. Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
- d. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
- e. Masih Kurangnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan daerah,
- f. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat melalui Iinstitusi Masyarakat Pedesaan dalam pengembangan program Keluarga Berencana
- h. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Tantangan dan Peluang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu didukung dengan serta antara pemerintah dan masyarakat.

Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Meranti jumlahnya makin meningkat akibat dari kompleksitas permasalahan sosial ekonomi didalamnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa ancaman dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Belum optimalnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MOW MOP Implant dan IUD)
- h. Budaya masyarakat yang masih mempertahankan pemahaman “*banyak anak banyak rezeki*”.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah pusat melalui program penanggulangan kemiskinan ekstreme menjadi nol persen pada tahun 2024.
- b. Adanya regulasi yang mengatur tentang pembagian urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi

dan kabupaten.

- c. Komitmen kepala Daerah terpilih yang telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan penanganan PMKS di daerah.
- d. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Makin baiknya aksesabilitas dan layanan keluarga berencana.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MERANTI

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS.
 - Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk.
- c. Meningkatkan Kesetaraan Gender. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi OPD		Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	15	18	20	25	29
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	N/A	15	18	20	25	29
		Meningkatnya Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	88	90	92	94
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	25,28%	24,61%	22,10%	19,50%	19%	18%
		Meningkatnya Penanganan Terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	77%	79%	81%	83%	85%	87%
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15
3.	Meningkatkan Kesenjangan Gender		Indeks Pembangunan Gender	86,30%	86,40%	86,50%	86,60%	86,70%	86,80%
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	96%	97%	97%	97%	98%	98%
			Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	5,06%	6,11%	7,15%	8,13%	9,16%	10,01%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1 Matrik Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1																			
1	06																		
1	06	01																	
1	06	01	2.0																
1	06	01	1																
1	06	01	1	06															
1	06	01	2																
1	06	01	2	01															
1	06	01	6																
1	06	01	6	02															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	22,000,000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan Yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	90 %	90 %		1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	0	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	5,500,000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	305,380,000	553,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	372,500,000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											60,000,000	60,000,000			66,000,000		
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	90 %	90 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	60,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	66,000,000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											518,826,800	583,430,524			613,784,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 01 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	123,045,200	123,045,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	133,350,000	
1 06 01 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	395,781,600	460,385,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	480,434,000	
1 06 01 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											48,394,000	64,394,000				72,170,000	
1 06 01 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	33,394,000	49,394,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	55,670,000	
1 06 01 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	90 %	90 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	90 %	16,500,000	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											131,417,250	106,398,000				128,637,000	
1 06 02 1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)											116,865,250	103,674,000				124,070,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum				Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 02 2.0 02 1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan	Meningkatnya Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil dalam Aspek Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	116,865,250	103,674,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	80 %	124,070,000	
1 06 02 2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											14,552,000	2,724,000			4,567,000		
1 06 02 2.0 02 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang ditangani	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	9 Orang	9 Orang	100 %	100 %	14,552,000	2,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	80 %	4,567,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											119,995,000	214,925,000			231,260,000		
1 06 04 2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											0	74,930,000			82,500,000		
1 06 04 2.0 09 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS Yang terdata dan di Rehabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan layanan Data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10100 Orang		10100 Orang		10100 Orang	0	74,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS Yang terdata dan di Rehabilitasi	10100 Orang	82,500,000	
1 06 04 2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											119,995,000	139,995,000			148,760,000		
1 06 04 2.0 2 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat bantuan layanan Rujukan	Terlayannya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	55 Orang	50 Orang	50 Orang	119,995,000	139,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	50 Orang	148,760,000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											11,999,840,200	2,659,364,328			2,700,180,000		
1 06 05 2.0 1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											15,694,000	25,694,000			32,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.06.05.2.01	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang di Rujuk	Jumlah Anak Terlantar yang Terlayani	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	20 Orang	25 Orang	20 Orang	20 Orang	15,694,000	25,694,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	71 %	32,000,000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											11,984,146,200	2,633,670,328			2,668,180,000		
1.06.05.2.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Persentase Data Fakir Miskin yang dikelola dan yang Menerima Bantuan	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	5000 KPM	6000 KPM	85 %	85 %	100,000,000	360,641,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	71 %	367,500,000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PKH	Persentase Data Fakir Miskin yang dikelola dan yang Menerima Bantuan	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	15000 KPM	15000 KPM	85 %	85 %	284,146,200	42,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	71 %	165,680,000	
1.06.05.2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan	Persentase Data Fakir Miskin yang dikelola dan yang Menerima Bantuan	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 %	71 %	4374 KPM	6000 KPM	85 %	85 %	11,600,000,000	2,230,629,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	71 %	2,135,000,000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											64,999,250	64,999,250			65,988,651		
1.06.06.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											14,999,400	14,999,400			15,750,000		
1.06.06.1.01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat Bantuan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan layanan Perlindungan Sosial	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	30 KK	30 KK	100 %	100 %	14,999,400	14,999,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	15,750,000	
1.06.06.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											49,999,850	49,999,850			50,238,651		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 06 02 2.0 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang menerima Pelayanan	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	30 KK	30 KK	100 %	100 %	49,999,850	49,999,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	90 %	50,238,651	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											827,957,200	906,219,150		1,019,386,488			
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											127,134,300	110,396,150		134,391,488			
2 08 02 2.0 1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											34,999,800	34,997,000		37,650,000			
2 08 02 2.0 1 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah OPD yang di Advokasi dalam pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Teradvokasi	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	88 %	20 OPD	20 OPD	20 OPD	20 OPD	34,999,800	34,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	88 %	37,650,000	
2 08 02 2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											24,999,850	22,889,500		26,250,000			
2 08 02 2.0 2 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Perempuan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang Teradvokasi	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	88 %	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	24,999,850	22,889,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	88 %	26,250,000	
2 08 02 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											67,134,650	52,509,650		70,491,488			
2 08 02 2.0 3 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Pembinaan	Jumlah organisasi Perempuan yang Meningkatkan Kapasitas SDMnya	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	88 %	2 Kelembagaan	2 Kelembagaan	2 Kelembagaan	2 Kelembagaan	67,134,650	52,509,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	88 %	70,491,488	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											150,450,000	220,172,000		240,495,000			
2 08 03 2.0 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											150,450,000	150,450,000		165,495,000			

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.08.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	Jumlah Orang Yang Mendapat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah orang yang Mendapatkan Sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	280 Orang	280 Orang	280 Orang	280 Orang	150,450,000	150,450,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	90 %	165,495,000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											0	69,722,000				75,000,000	
2.08.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 %		15 Layanan		15 Layanan	0	69,722,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	90 %	75,000,000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												74,023,000	194,023,000			158,250,000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												74,023,000	194,023,000			158,250,000	
2.08.06.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Jumlah Anak yang terfasilitasi Pemenuhan Hak Anaknya	Terfasilitasinya Pemenuhan Hak Anak	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 Lembaga/Anak	105 Lembaga/Anak	105 Lembaga/Anak	105 Anak	105 Anak	105 Anak	74,023,000	74,023,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	105 Lembaga/Anak	26,250,000	
2.08.06.2.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Hak Anak	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 Lembaga/Anak	105 Lembaga/Anak	105 Lembaga/Anak	2 Dokumen	105 Anak	105 Anak	0	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	105 Lembaga/Anak	32,000,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												476,349,900	381,628,000			486,250,000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												374,043,900	279,322,000			376,250,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 08 07 2.0 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Kasus Kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Kasus kekerasan yang diberikan Pelayanan oleh UPTD PPA Kabupaten Kepulauan Meranti	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Kasus	0 Kasus	75 Kasus	75 Kasus	24,999,900	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	26,250,000	
2 08 07 2.0 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Kasus Kekerasan Yang Mendapatkan pendampingan	Jumlah Kasus kekerasan yang diberikan Pelayanan oleh UPTD PPA Kabupaten Kepulauan Meranti	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Kasus	50 Kasus	75 Kasus	75 Kasus	349,044,000	279,322,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	350,000,000	
2 08 07 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											102,306,000	102,306,000			110,000,000		
2 08 07 2.0 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas (SDM) Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus	Persentase Pelayanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	102,306,000	102,306,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhrensif	100 %	110,000,000	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											4,558,100,580	4,466,182,900			4,837,020,000		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											159,774,880	109,775,000			177,500,000		
2 14 02 2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											49,999,880	0			52,500,000		
2 14 02 2.0 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah Dokumen Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang disusun	Tersusunnya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,999,880	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 Dokumen	52,500,000	
2 14 02 2.0 2	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											109,775,000	109,775,000			125,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2	14	02	2.0	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Pemetaan Keluarga yang Beresiko Stunting	Tersedianya Data Suvailance tingkat Desa	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6,575,000	6,575,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 Dokumen	10,000,000	
2	14	02	2.0	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Tersedianya paket Data Komunikasi pada Balai Penyuluhan KB	Tersedianya Data Suvailance tingkat Desa	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Balai	9 Balai	1 Dokumen	1 Dokumen	103,200,000	103,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1 Dokumen	115,000,000	
2		14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												2,530,626,000	2,530,626,000				2,714,770,000	
2		14	03	2.0	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal												644,915,000	644,915,000				699,420,000
2	14	03	2.0	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Meningkatkan Capaian Kinerja Program Bangsa Kencana Melalui Advokasi Bagi Stakeholder dan Mitra Kerja	Meningkatnya Kesertaan PUS Ber-KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	68 %	68 %	4,375,000	4,375,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	5,000,000	
2	14	03	2.0	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Tersedianya Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Berbasis Media Tradisional di Kabupaten	Meningkatnya Kesertaan PUS Ber-KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	68 %	68 %	25,000,000	25,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	25,000,000	
2	14	03	2.0	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Meningkatkan Ketersediaan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kesertaan PUS Ber-KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	68 %	68 %	70,640,000	70,640,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	80,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluasan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 14 03 2.0 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Peningkatan Upaya Percepatan Penurunan Stunting	Meningkatnya Kesertaan PUS Ber-KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	9 Kecamatan	9 Kecamatan	68 %	68 %	140,400,000	140,400,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	150,000,000	
2 14 03 2.0 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	Meningkatnya Kesertaan PUS Ber-KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	9 Balai	9 Balai	68 %	68 %	364,500,000	364,500,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	389,420,000	
2 14 03 2.0 08	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Tersedianya Laporan Audit Kasus Stunting di Tingkat Kabupaten Kota	Meningkatnya Kesertaan PUS Ber-KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	68 %	68 %	40,000,000	40,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	50,000,000	
2 14 03 2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)											484,800,000	484,800,000				500,000,000	
2 14 03 2.0 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Data dan informasi KKBPK yang akurat di lini lapangan	Menjaga Keberlangsungan Peserta KB Aktif	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	101 Desa / Kelurahan	101 Desa / Kelurahan	101 Desa/Kelurahan	101 Desa/Kelurahan	484,800,000	484,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	500,000,000	
2 14 03 2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											952,411,000	952,411,000				1,015,350,000	
2 14 03 2.0 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Menjamin Ketersediaan Alokasi di Faskes	Tersedianya Alokasi untuk Pelayanan KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	11 Faskes	11 Faskes	68 %	68 %	4,950,000	4,950,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	6,700,000	
2 14 03 2.0 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB dengan Metode MKJP	Tersedianya Alokasi untuk Pelayanan KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	629 Orang	629 Orang	68 %	68 %	169,030,000	169,030,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	200,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 14 03 2.0 3 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Alokon untuk Pelayanan KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	68 %	68 %	771,831,000	771,831,000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	800,000,000	
2 14 03 2.0 3 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Jumlah Faskes yang Dilakukan Pembinaan	Tersedianya Alokon untuk Pelayanan KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	4 Faskes	4 Faskes	68 %	68 %	6,600,000	6,600,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	8,650,000	
2 14 03 2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											448,500,000	448,500,000			500,000,000		
2 14 03 2.0 4 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Terwujudnya pelaksanaan dan pengelolaan program KKBP di kampung KB	Menjaga Keberlangsungan PUS Ber-KB di Kampung KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	26 Kampung KB	26 Kampung KB	65 %	65 %	448,500,000	448,500,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	70 %	500,000,000	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											1,867,699,700	1,825,781,900			1,944,750,000		
2 14 04 2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											1,827,699,900	1,825,781,900			1,902,750,000		
2 14 04 2.0 1 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Tersedianya Sarana Kelompok ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terbina	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	22 Kelompok	22 Kelompok	65 %	65 %	363,000,000	363,000,000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	75 %	392,750,000	
2 14 04 2.0 1 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Jumlah Kader Kelompok Ketahanan yang di Bina	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terbina	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	360 Orang	360 Orang	65 %	65 %	199,999,900	198,081,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	75 %	210,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	14	04	2.0 1	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Percepatan Penurunan Angka Stunting	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terbina	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	4947 Orang	4947 Orang	65 %	65 %	1,264,700,000	1,264,700,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	75 %	1,300,000,000
2	14	04	2.0 2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								39,999,800	0				42,000,000			
2	14	04	2.0 2	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Angka Kesertaan ber KB	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	62 %	0 %	68 %	68 %	39,999,800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Keluarga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKL	75 %	42,000,000
TOTAL															22,690,887,246	13,397,774,429				13,905,930,428	

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana program, Kegiatan, dan SubKegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Saranadan PrasaranaGedung Kantoratau BangunanLainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasaranaPendukungGedung Kantoratau BangunanLainnya.

b. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT.
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.
- 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NaPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pemeliharaan Anak-anak terlantar
 - Rujukan Anak-anak terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

e. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan.
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

f. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG.
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi.
3. Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

g. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

i. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Penyediaan Layanan Bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

j. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga ;
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

k. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja ;
 - Komunikasi, Indormasi, dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai

- kearifan budaya Lokal ;
 - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang ;
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) ;
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK ;
 - Pengendalian Program KKBPK.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya ;
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ;
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB ;
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

I. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ;
 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ;

- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Meranti Tahun 2022, usulan program dan kegiatan masyarakat, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Renja Perubahan Tahun 2022 ini juga merupakan penjabaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun 2022.

Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus didukung oleh:

1. Komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi ;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
3. Keberpihakan kepada kesejahteraan sosial pmks ;
4. Peran serta masyarakat, orsos, dan dunia usaha secara aktif ;
5. Sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Kedepan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, akan menjadi sebuah Dinas yang mampu memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Akhirnya apa yang dapat disusun dalam wujud Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 ini dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (Clean Governance and Good Government) dan semoga bermanfaat.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



M. KHARDAFI, SE, M.IP

Penata Tk. I / (III.d)

NIP. 19771118 200901 1 005